

URGENSI DAN RELEVANSI PEMBELAJARAN SEJARAH MARITIM UNTUK WILAYAH PEDALAMAN

Tsabit Azinar Ahmad

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

Maritime aspect is becoming a national priority. Nevertheless, its application in educational domain, especially in the history learning is still constrained. Therefore, the article focused to (1) analyze the urgency and relevance of the maritime history teaching in the history learning curriculum; (2) identify the problems and obstacles encountered in the implementation of maritime history teaching; (3) formulate ideas and strategies recommended in implementing the maritime history teaching in the inland areas that are not based maritime. Maritime history can not be separated from the overall national history, so its presence in the teaching of history becomes an inherent factor. However, learning maritime history will face cultural and pedagogical problems when delivered in areas do not pertain directly to the maritime aspect. Therefore, it needs contextualization strategies in learning of maritime history. First attempts to do is implement a linking and bridging strategies. Thus, the strengthening of maritime vision can be applied anywhere and contextual in a diverse cultural environment.

Keywords: maritime history, history learning, inland areas.

ABSTRAK

Aspek kemaritiman saat ini tengah menjadi isu nasional. Akan tetapi penerapannya dalam ranah pendidikan, khususnya pembelajaran sejarah masih terkendala. Oleh karena itu, tulisan fokus pada upaya untuk (1) menganalisis urgensi dan relevansi terhadap pembelajaran sejarah maritim dalam kurikulum mata pelajaran sejarah; (2) mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran sejarah maritim; (3) merumuskan gagasan dan strategi yang direkomendasikan dalam menerapkan pembelajaran sejarah maritim di wilayah yang tidak berbasis maritim. Sejarah maritim tidak dapat dilepaskan dari sejarah nasional secara keseluruhan, sehingga keberadaannya dalam pembelajaran sejarah menjadi faktor yang melekat. Akan tetapi, pembelajaran sejarah maritim akan mengalami kendala ketika disampaikan pada wilayah-wilayah yang tidak bersinggungan langsung dengan aspek kemaritiman. Oleh karena itu, perlu ada strategi kontekstualisasi dalam pembelajaran sejarah maritim. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan strategi *linking* dan *bridging* dalam pembelajaran sejarah. Dengan demikian, diharapkan penguatan visi maritim dapat dilakukan di manapun dan kontekstual dalam lingkungan budaya yang beraneka ragam.

Kata Kunci: sejarah maritim, pembelajaran sejarah, wilayah pedalaman

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 17.504 pulau dan 12.827 desa tepi laut atau sekitar 15,6% dari seluruh desa/kelurahan yang ada. (*Statistik Indonesia*, 2016:3-4). Hal ini mendorong pemerintah fokus dalam pengembangan aspek kemaritiman dan penguatan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pilar pertama yang dikuatkan dalam pengembangan poros maritim dunia adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia (“Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, 2014).

Upaya membangun kembali budaya maritim bertujuan agar masyarakat Indonesia memiliki landasan budaya dan nilai bahari yang kuat sebagai dasar pembangunan negara maritim (Sulistiyono, 2009). Salah satu bentuk penguatan budaya maritim adalah dengan menghadirkan perspektif historis tentang berbagai kehidupan maritim masyarakat. Aspek maritim dalam masyarakat berhubungan dengan interaksi manusia dan laut. Interaksi tersebut mencakup berbagai aspek seperti perdagangan, pelayaran, perkapalan, tradisi bahari, mitologi laut, perompakan, perikanan, hukum laut (Asnan, 2007:4).

Kehidupan maritim Indonesia dalam perspektif sejarah menjadi kajian yang perlu untuk diulas karena perkembangan masyarakat kita banyak berhubungan dengan laut. Laut pulalah yang membawa berbagai pengaruh peradaban besar ke kawasan Indonesia, sehingga mempengaruhi corak kehidupan masyarakat sampai saat ini. Pentingnya kemaritiman dalam kajian sejarah pernah diungkapkan oleh AB Lapijan (1992:3) dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar. Ia mengungkapkan bahwa laut adalah pembuka sejarah bangsa Indonesia. Aktivitas kehidupan masyarakat sejak awal penyebarannya bahkan terjadi di laut (Utomo, 2014:4). Oleh karena itu, memperkuat budaya maritim tidak dapat dipisahkan dari kajian sejarah maritim yang ada di Indonesia.

Salah satu upaya memperkuat budaya maritim adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini, sejarah maritim perlu disampaikan melalui pendidikan sejarah, baik di jalur formal di sekolah, jalur informal di keluarga, maupun jalur nonformal di masyarakat. Namun demikian, tulisan ini tidak akan menjelaskan seluruh jalur, tetapi fokus pada pembelajaran sejarah yang diterapkan di sekolah. Jalur formal di sekolah dipilih karena melalui jalur ini, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan dan arah tujuan pendidikan sejarah. Selain itu, dalam pendidikan formal terdapat standarisasi yang menjadi acuan, yakni kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai arahan sekaligus landasan pijak untuk menjaminnya kesinambungan materi dengan tujuan pendidikan nasional.

Upaya menguatkan budaya maritim dalam pendidikan dilakukan melalui pembelajaran sejarah maritim. Pembelajaran sejarah maritim merupakan upaya terintegrasi untuk mengenalkan sejarah maritim secara luas di kalangan peserta didik. Melalui pembelajaran sejarah maritim, diharapkan terwujud kesepahaman terhadap identitas bersama sebagai bangsa bahari. Selain itu, pembelajaran sejarah maritim bermaksud agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran bahwa laut berperan sebagai variabel dependen terhadap perkembangan masyarakat. Untuk itu, isu-isu yang menjadi *concern* dalam sejarah maritim menjadi kajian yang diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat mampu mengambil makna tentang arti penting laut dan perairan dalam perkembangan sejarah Indonesia, sehingga penguatan budaya bahari dapat diterapkan.

Penerapan pembelajaran sejarah maritim tidaklah tanpa permasalahan. Walaupun Indonesia adalah negara kepulauan, tidaklah berarti budaya yang dimilikinya bersifat homogen. Susanto Zuhdi (2006:4) mengungkapkan bahwa perkembangan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara mengarah pada dua karakteristik. *Pertama*, negara-negara persungai/

pesisir, meliputi kepulauan Indonesia, semenanjung Malaya, dan Filipina. *Kedua*, negara-negara persawahan di dataran rendah, seperti Burma, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Jawa. Dua pola kerajaan ini juga ditemukan di Indonesia, di mana pola persungai/pesisir mewariskan corak kehidupan maritim. Sementara itu, pola persawahan mewariskan corak kehidupan agraris (Zuhdi, 2006:7). Perbedaan ini kemudian bermuara pada munculnya istilah wilayah pesisir dan wilayah pedalaman.

Dalam konteks Jawa, daerah pesisir merujuk pada kawasan yang ada di daerah pantai utara Jawa, seperti Surabaya, Semarang, Tegal, Rembang, Pati. Sementara daerah pedalaman merujuk pada kawasan mancanegara, seperti daerah Kediri, Pacitan, Ngawi, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara, serta Banyumas (Thohir, 1999; Wasino, 18-19).

Perbedaan karakteristik masyarakat karena faktor budaya dan geografis inilah yang menjadi tantangan utama pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim. Pembelajaran sejarah maritim akan mengalami kendala ketika disampaikan pada wilayah-wilayah yang tidak bersinggungan langsung dengan aspek kemaritiman. Hal ini menyebabkan pembelajaran sejarah maritim seolah menjadi sesuatu yang “asing” dan *out of context* ketika disampaikan. Akan tetapi, hal ini tidak seketika memunculkan alasan bahwa pembelajaran sejarah maritim tidak perlu diajarkan di daerah pedalaman.

Pembelajaran sejarah maritim tetap perlu disampaikan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap realitas sejarah di Indonesia yang tidak dapat lepas dari laut. Pembelajaran sejarah maritim juga berpotensi memperkenalkan keragaman sejarah dan budaya bagi peserta didik yang tidak secara langsung bersentuhan dengan aspek kemaritiman. Dengan demikian, diharapkan tumbuh sikap saling memahami dan menghargai perbedaan sejarah dan kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan pada pemikiran di atas, tulisan ini terfokus pada upaya menerapkan

pembelajaran sejarah maritim, terutama di wilayah pedalaman yang tidak bersinggungan langsung dengan aktivitas kemaritiman.

URGENSI & RELEVANSI PEMBELAJARAN SEJARAH MARITIM

Kehidupan maritim dalam sejarah dunia menempati posisi yang istimewa. Lincoln Paine (2013) mencatat sektor maritim telah mampu menjadi penggerak sejarah umat manusia. Ia berpendapat bahwa nenek moyang manusia telah mampu melakukan adaptasi teknologi dan sosial agar mampu hidup di kawasan perairan, seperti perdagangan, peperangan, eksplorasi, dan migrasi. Ia mengambil contoh dari persebaran Islam yang sangat dipengaruhi oleh penjelajahan samudera.

Ada pula kajian Fernand Braudel (1972:276) yang mengkaji tentang arti penting laut bagi masyarakat di kawasan Mediterania. Menurut Braudel, laut turut serta membentuk manusia di sana. Laut juga menyediakan sarana untuk mempersatukan masyarakat yang tersebar di berbagai titik, serta menjadi sarana pengangkutan dan perdagangan. Laut pulalah yang menyediakan tantangan sehingga mengharuskan masyarakat untuk menaklukkannya. Hal ini berlaku pula untuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Laut telah membentuk sejarah Indonesia sejak ribuan tahun yang silam sampai saat ini.

Kajian kemaritiman dalam perspektif sejarah memiliki arti strategis dalam membangun budaya bahari Indonesia. Singgih Tri Sulistiyono dkk. (2005:2-3) mencatat ada beberapa arti penting kajian atas sejarah maritim. *Pertama*, didukung dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan terbesar, terdapat berbagai kelompok etnik yang selama berabad-abad telah menggunakan laut sebagai wahana untuk saling berkomunikasi. Sejarah maritim menjadi wahana untuk membangkitkan kesadaran sebagai sebuah bangsa.

Kedua, aspek maritim yang telah melekat di masyarakat Indonesia selama ribuan tahun. Dengan demikian, telah terbentuk seperangkat nilai yang mampu

menjaga eksistensi dan kontinuitas masyarakat. Dengan demikian, sejarah maritim berperan sebagai media sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai budaya bahari bagi masyarakat. Berbagai nilai tersebut sangat berperan dalam menumbuhkan kearifan masyarakat terhadap pengelolaan bahari.

Ketiga, masyarakat maritim yang berkembang di kepulauan Indonesia telah menjalin hubungan selama berabad-abad. Di sini, sejarah maritim mampu memberikan contoh nyata tentang komunikasi lintas budaya (*cross-cultural communication*) antara satu komunitas dengan komunitas yang lain sebagai dasar integrasi di kalangan masyarakat. Di sini dicontohkan tentang nilai egaliter dan keterbukaan sebagai prasyarat terbentuknya integrasi (Sulistiyono dkk., 2005:3).

Pembelajaran sejarah maritim yang diberikan di sekolah bermanfaat agar kehidupan manusia di masa lalu dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh. Hal ini berfungsi agar peserta didik mampu menghargai arti penting laut dan perairan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Penghargaan atas eksistensi dan kontribusi laut dalam membentuk kebudayaan Indonesia menjadi satu prasyarat terwujudnya kelestarian budaya dan lingkungan di masa kini dan mendatang. Namun demikian, apakah hal ini berlaku untuk wilayah pedalaman?

Bagi daerah di pedalaman, pembelajaran sejarah maritim juga memiliki peran untuk melihat interaksi dan resiprositas antara masyarakat pesisir dan pedalaman. Hal ini karena baik masyarakat yang tinggal di pesisir maupun di pedalaman ternyata hidup dalam sebuah ketergantungan akan laut (Utomo, 2014:3). Ke dua kelompok masyarakat tersebut hidup dalam kondisi hubungan yang resiprokal, bahkan pada titik tertentu ada hasrat untuk saling mengendalikan. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah maritim juga berperan untuk melihat seberapa penting peran laut bagi masyarakat pedalaman. Hal ini bermuara pada penguatan tentang kontribusi laut dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya aspek kemaritiman dalam masyarakat Indonesia yang tertuang dalam sejarah maritim pada dasarnya memiliki relevansi dalam pelajaran sejarah di sekolah. Beberapa aspek dominan dari kajian maritim yang terintegrasi dengan struktur kurikulum terutama dalam aspek (1) perniagaan, (2) pelayaran dan eksplorasi, (3) persilangan budaya dan inkorporasi gagasan, (4) peperangan dan perlawanan, dan (5) penguasaan wilayah dan politik kelautan.

Pertama, aspek perniagaan berhubungan dengan kepemilikan modal, sistem perdagangan, komoditas-komoditas perdagangan, sumber-sumber penghasil barang, serta perkembangan pelabuhan (Lapian, 2008:59-88). *Kedua*, aspek pelayaran dan eksplorasi berhubungan dengan teknologi pelayaran, jenis-jenis kapal, serta jalur-jalur pelayaran (Lapian, 2008:1-40). *Ketiga*, aspek persilangan budaya dan inkorporasi gagasan berhubungan dengan pengaruh dunia luar terhadap perkembangan gagasan, ideologi, agama, dan budaya yang tersebar melalui lautan. *Keempat*, aspek peperangan dan perlawanan berhubungan dengan *naval power* atau kekuatan armada laut dan konflik yang terjadi di lautan (Hamid, 2015:27). *Kelima*, aspek penguasaan wilayah dan politik kelautan berhubungan dengan *sea power* atau penguasaan atas wilayah laut atau untuk menjamin kelancaran pelayaran dan perdagangan, serta kebijakan politik tentang laut (Hamid, 2015:27). Aspek-aspek tersebut relevan dengan kompetensi dasar untuk SMA yang ada dalam kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa di setiap jenjang, terdapat aspek kemaritiman yang menjadi wahana memperkuat pemahaman tentang arti penting laut. Hal ini tampak dari adanya beberapa KD yang memiliki kesesuaian dengan aspek-aspek kemaritiman. Dengan demikian kurikulum 2013 sebenarnya sudah mengakomodasi materi-materi sejarah maritim. Ditinjau dari aspek penguatan budaya maritim, hal ini merupakan potensi

Tabel 1. Kompetensi Dasar SMA pada Kurikulum 2013 dan Kesesuaian Aspek Kemeritiman

Kls	Kompetensi Dasar	Aspek Kemeritiman	Materi yang sesuai	
X	3.3	Menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia (melanesoid, proto, dan deutero melayu)	Persilangan budaya dan inkorporasi gagasan	Persebaran proto dan deutero melayu.
	3.5	Menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia	(1) Perniagaan, (2) Persilangan budaya dan inkorporasi gagasan	Proses India-nisasi
	3.6	Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini	(1) Perniagaan, (2) Peperangan dan perlawanan, (3) Penguasaan wilayah dan politik kelautan	Sriwijaya sebagai negara maritim
	3.7	Menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia	(1) Perniagaan, (2) Persilangan budaya dan inkorporasi gagasan	Proses Islamisasi
	3.8	Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini	(1) Perniagaan, (2) Peperangan dan perlawanan, (3) Penguasaan wilayah dan politik kelautan	Kerajaan-kerajaan Islam: Banten, Ternate, Tidore, Gowa.
	XI	3.1	Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) ke Indonesia	(1) Perniagaan, (2) Pelayaran dan eksplorasi, (3) Persilangan budaya dan inkorporasi gagasan, (4) Penguasaan wilayah dan politik kelautan.
3.2		Menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) sampai dengan abad ke-20	Peperangan dan perlawanan	Perlawanan terhadap kolonialisme
3.7		Menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia	(1) Peperangan dan perlawanan, (2) Penguasaan wilayah dan politik kelautan.	Perang Dunia II dan Pendudukan Jepang
XII	3.3	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal	Penguasaan wilayah dan politik kelautan	Deklarasi Djuanda dan konsep wawasan nusantara
	3.4	Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin	Peperangan dan perlawanan	Pertempuran laut Aru

sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pondasi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

HAMBATAN PEMBELAJARAN SEJARAH MARITIM

Pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim tidaklah tanpa hambatan. Ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini menjadi pekerjaan rumah agar segera diselesaikan. Untuk memudahkan analisis, hambatan dapat ditinjau dari tiga aspek: historiografis, pedagogis, dan geografis.

Pertama, ditinjau dari aspek historiografis, Singgih Tri Sulistiyono (2009:14) menjelaskan bahwa

Penulisan sejarah maritim Nusantara masih ketinggalan jika dibandingkan dengan penulisan jenis sejarah yang lain seperti sejarah pedesaan dan agraria, sejarah politik, sejarah ekonomi, dan sebagainya. Ketertinggalan itu juga semakin terasa jika dibandingkan dengan kemajuan penulisan sejarah maritim di negara-negara lain." Ketertinggalan ini berkaitan dengan belum tereksplorasinya tema-tema yang berhubungan dengan aspek kemaritiman.

Ketertinggalan dalam aspek penulisan sejarah semakin menguat ketika dihadapkan pada realitas hubungan antara pesisir dan pedalaman. Dari berbagai referensi tentang sejarah maritim Indonesia yang ada pada saat ini, hubungan antara daerah pesisir dan pedalaman masih mendapatkan porsi yang sedikit. Sedikitnya kajian yang menghubungkan antara daerah pesisir dan pedalaman berdampak pada terbatasnya akses guru di daerah pedalaman untuk membangun kontekstualisasi atas sejarah maritim.

Kedua, aspek yang menjadi hambatan pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim adalah faktor pedagogis. Keterbatasan aspek pedagogis meliputi beberapa komponen, seperti (1) faktor kebijakan, (2) faktor guru-guru sejarah, (3) faktor media dan sumber belajar; (4) faktor siswa. Ditinjau dari faktor kebijakan, walaupun konten sejarah maritim telah terintegrasi di dalam materi yang diajarkan, belum

ada upaya terintegrasi dalam penyampaian. Aspek maritim selama ini hanya melekat dalam materi yang lain. Artinya, belum ada kajian khusus tentang aspek kemaritiman yang ada pada tiap periode. Sampai saat ini, masih ada sekolah yang belum menerapkan kurikulum 2013. Akibatnya, pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sama sekali tidak ada mata pelajaran sejarah. Di SMK yang masih menerapkan kurikulum 2006, yang tersedia hanyalah mata pelajaran IPS, di mana materi kesejarahan hanya membahas pergerakan nasional (Wawancara Azizah Ariani, S.Pd.Gr, 9 September 2016).

Ditinjau dari faktor guru, pembelajaran sejarah maritim pada dasarnya bukanlah kajian yang sama sekali baru. Namun demikian, bekal teoretis tentang aspek kemaritiman masih belum maksimal. Lemahnya aspek teoretis dan konseptual tentang sejarah maritim disebabkan perkembangan historiografi yang masih belum maksimal. Pengembangan mata kuliah sejarah maritim di beberapa perguruan tinggi keguruan bagi calon guru dianggap belum menjadi prioritas. Belum dimasukkannya mata kuliah khusus tentang kemaritiman dilatarbelakangi oleh permasalahan relevansi kajian dengan konteks lokalitas yang berkembang. Namun demikian, ketika saat ini aspek kemaritiman tengah menjadi prioritas nasional, perubahan atas kurikulum di perguruan tinggi keguruan sepatutnya menjadi kebutuhan.

Ketersediaan media pembelajaran dan sumber belajar tentang aspek kemaritiman menjadi komponen yang berpengaruh terhadap kesuksesan pembelajaran. Di sini, media dan sumber belajar berperan dalam menumbuhkan visualisasi guru dan peserta didik terhadap berbagai aktivitas kebaharian. Namun demikian, ternyata akses bagi guru dan siswa tentang media pembelajaran dan sumber belajar yang kredibel masih terkendala (wawancara Sri Utari, S.Pd., 9 September 2016). Guru-guru mengaku masih mengalami hambatan untuk mencari referensi yang lengkap tentang kehidupan maritim di

masa lalu yang bersifat komprehensif.

Ditinjau dari faktor siswa, ada permasalahan budaya menjadi penghambat ketercapaian tujuan pembelajaran sejarah maritim secara optimal. Bagi siswa yang berasal dari wilayah pedalaman, wawasan terhadap budaya dan kearifan lokal kemaritiman nyaris tidak ada (Wawancara Arifin Suryo Nugroho, S.Pd, M.Pd., 9 September 2016). Selain itu, gambaran kehidupan bahari seperti aktivitas pelayaran dan pelabuhan masih bersifat abstrak (Wawancara Heni Purwono, S.Pd, M.Pd., 9 September 2016).

Namun demikian, permasalahan tentang tidak akrabnya siswa dengan budaya maritim tidak hanya terjadi di wilayah pedalaman. Di wilayah yang masih tergolong pesisir, masih terdapat pemahaman yang rendah terkait sejarah maritim. Penelitian Nur Achmad Haryanto (2010) terhadap masyarakat Desa Bajing Meduro, Desa Babaktulong, dan Desa Dasun, yang mewakili sebagian besar karakteristik masyarakat Rembang menunjukkan tingkat kesadaran sejarah kemaritiman yang rendah dan cukup memprihatinkan. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi rendahnya kesadaran sejarah masyarakat pesisir terhadap aspek kemaritiman diduga karena tidak adanya tradisi tutur yang berkembang pada masyarakat Rembang, sehingga sejarah lokal yang dimiliki para generasi pendahulunya tidak dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Di satu sisi, belum ada muatan lokal khusus sejarah tentang kemaritiman di wilayah Rembang pada kurikulum pendidikan dan minimnya sosialisasi tentang sejarah kemaritiman di Rembang.

Selain aspek historiografis dan pedagogis, ada pula hambatan ditinjau dari aspek geografis. Hambatan ini terutama terjadi pada kawasan yang secara geografis dan kultural memiliki perbedaan dengan wilayah pesisir yang berbasis maritim. Perbedaan ini mengakibatkan permasalahan untuk membangun kontekstualisasi dan visualisasi. Permasalahan dalam membangun kontekstualisasi meliputi ketidakmampuan menghubungkan saling-

keterkaitan antara wilayah pesisir dan pedalaman. Hal ini sangat mungkin terjadi karena tidak tersedia contoh-contoh di sekitar lingkungan tempat tinggal siswa atau sekolah yang dapat dijadikan sebagai *best practices*. Ketika pembelajaran terhambat untuk dapat mengaitkan konteks lokalitas sekitar dengan aspek kemaritiman, akibatnya muncul permasalahan dalam membangun visualisasi atas aktivitas masyarakat di masa lalu yang berhubungan dengan bahari.

Permasalahan-permasalahan di atas turut menjadi faktor yang perlu dibenahi agar pembelajaran sejarah maritim mampu berperan sebagai wahana penumbuhan budaya maritim yang kokoh di masyarakat.

MENGGAGAS PEMBELAJARAN SEJARAH MARITIM DI PEDALAMAN

Pengembangan sejarah maritim, terutama untuk wilayah pedalaman dapat ditinjau dari dua segi. *Pertama*, pengembangan dari aspek konten. Pada aspek ini, strategi utama yang dilakukan adalah *linking*, yakni mencari keterhubungan, kesinambungan, dan resiprositas antara wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Secara teknis, aspek ini mencakup perumusan dari segi tujuan pembelajaran, materi, dan sumber-sumber yang mendukung pengajaran sejarah maritim.

Kedua, pengembangan dari aspek konteks. Pada aspek ini, strategi utama yang diketengahkan adalah *bridging*. Strategi *bridging* merupakan upaya untuk menjembatani perbedaan budaya antara wilayah pesisir dan pedalaman melalui upaya “menghadirkan” suasana kemaritiman ke dalam kelas. Pada aspek ini, secara teknis dilakukan penguatan atas faktor guru, strategi pembelajaran, dan fasilitas penunjang. Penguatan dua aspek ini menjadi prasyarat mutlak dalam pengembangan pembelajaran sejarah maritim.

Sebelum menerapkan pembelajaran sejarah maritim, ada beberapa tujuan yang patut untuk dipertimbangkan. Hasan (2016) merumuskan beberapa tujuan untuk pendidikan sejarah maritim, yaitu:

(1) memahami karakteristik kerajaan maritim Indonesia; (2) Memahami faktor-faktor pendukung kegiatan kerajaan maritim Indonesia; (3) Menganalisis keterkaitan antara kekayaan agraris dengan kemaritiman pada masa kerajaan maritim Indonesia; (4) Menganalisis fungsi kemaritiman dalam mempersatukan bangsa Indonesia; (5) Mengevaluasi kebesaran bangsa Indonesia di bidang maritim dan pengaruhnya pada kehidupan bangsa Indonesia masa kini; (6) mengidentifikasi nilai-nilai kemaritiman di masyarakat dan pengembangan nilai-nilai kemaritiman yang masih hilang tapi masih dilanjutkan (relevan) untuk kehidupan masa kini. (Hasan, 2016:3-4)

Linking: Pengembangan Aspek Content

Pengembangan pertama dengan menerapkan strategi *linking* menekankan aspek *content* atau esensi pembelajaran. Pada aspek ini pertama-tama perlu dirumuskan kesepahaman terhadap relevansi sejarah maritim dalam pembelajaran di pedalaman. Asumsi dasar yang dikembangkan adalah “tidak ada peristiwa sejarah yang berjalan sendiri.” Artinya, akan selalu ada keterkaitan antarperistiwa pada kurun waktu yang sama.

Pembelajaran ditekankan untuk mencari hubungan antara peristiwa di pesisir dan pedalaman, serta bagaimana kontribusi wilayah pedalaman terhadap aktivitas di pesisir. Asumsi ini kemudian diturunkan dan dikonsepsikan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapai secara umum adalah pengetahuan, kesadaran, dan perilaku yang bijak terhadap laut yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan bangsa Indonesia secara keseluruhan, baik di pesisir maupun di pedalaman. Dengan demikian, laut sebagai pemersatu tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi juga bisa berdampak dan dirasakan kehadirannya.

Upaya memperkuat asumsi bahwa selalu ada keterhubungan antarperistiwa sejarah yang ada di wilayah pedalaman dan pesisir adalah dengan menghadirkan keduanya secara bersama-sama. Untuk itu, perlu dihadirkan fakta yang mem-

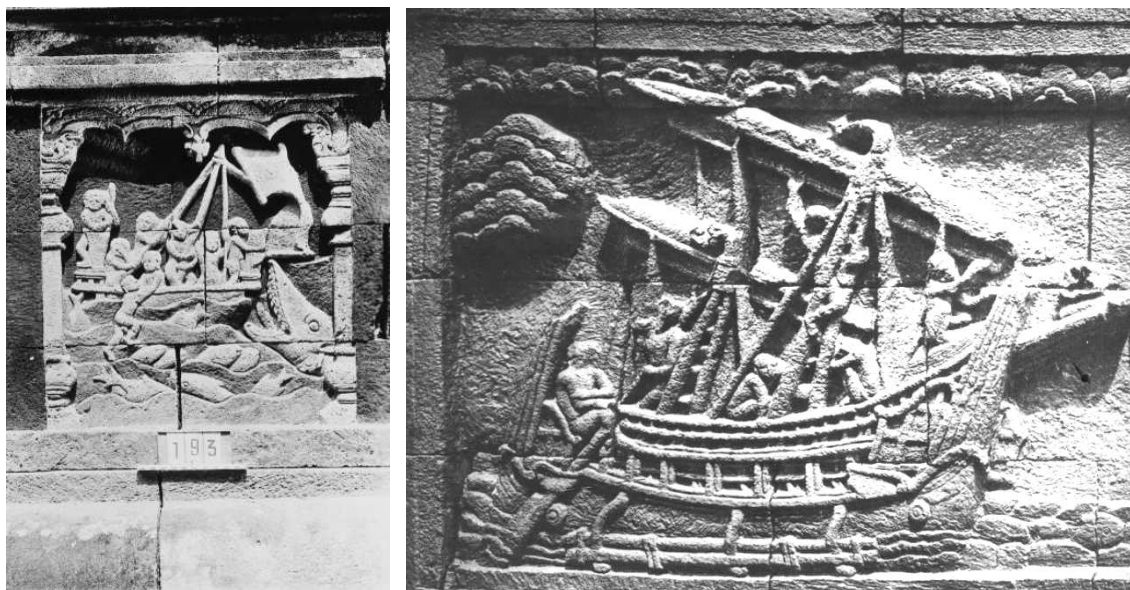
perkuat bahwa ke dua wilayah tersebut tidaklah dapat dipisahkan.

Fakta pertama adalah “laut merupakan pintu gerbang perubahan”. Melalui lautan, wilayah-wilayah pedalaman mendapatkan sentuhan-sentuhan baru seperti masuknya kepercayaan-kepercayaan dari luar: Hindu, Budha, Islam, maupun Kristen. Salah satu bukti yang memperkuat ini adalah bahwa peninggalan-peninggalan candi yang tertua di Jawa justru terdapat di wilayah pegunungan Dieng pada awal abad VIII (Raharjo, 2002:259). Hal ini sangat dimungkinkan karena wilayah pedalaman yang berupa pegunungan menjadi tempat yang sesuai dalam pembangunan bangunan suci.

Oleh karenanya, perkembangan wilayah pedalaman menjadi sangat dimungkinkan. Lincoln Paine mengungkapkan bahwa adalah hal yang luar biasa Indonesia saat ini adalah negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia. Islam sebagai agama yang muncul dari wilayah gurun tersebar secara luas justru menjadi agama mayoritas di wilayah kepulauan (Paine, 2013).

Fakta kedua yang perlu diperkuat adalah “selalu terdapat keterkaitan antara laut, daerah pesisir, dan daerah pedalaman”. Fakta ini penting untuk disampaikan agar masyarakat dan peserta didik di daerah pedalaman memahami bahwa laut menjadi bagian yang turut mempengaruhi kehidupan mereka. Upaya menguatkan fakta ini dilakukan dengan menghadirkan data dalam aspek perniagaan terdapat beberapa jaringan perdagangan, yakni (1) perdagangan antara daerah pantai dan pedalaman, (2) perdagangan antardaerah pantai, (3) perdagangan dengan pulau-pulau lepas pantai; (4) perdagangan dengan seberang laut (Asnan, 2007: 143).

Hubungan dagang yang terjalin antara daerah pedalaman dan pesisir disebabkan beberapa komoditas penting yang diperjualbelikan di pasar internasional adalah barang-barang yang berasal dari pedalaman, seperti *benzoin* (bahan kemenyan), kamfer, kayu dan hasil-hasil hutan, barang-barang tambang, serta beras



(a)

(b)

Keterangan

Foto relief tentang aktivitas pelayaran

Foto relief perahu bercadik di Borobudur

Gambar 1. Salah satu relief di Borobudur tentang aktivitas kemaritiman
(Sumber: kitlv.nl)

dan bahan-bahan makanan (Asnan, 2007:144-151; Lapian, 2008: 79-95; Kartodirdjo, 2014:10-12, 145). Sementara itu, komoditas yang dibawa dari pesisir ke pedalaman antara lain kain, garam, tembakau Cina, opium, dan berbagai barang besi. Di sini sungai memiliki peran yang menghubungkan antara pesisir dan pedalaman.

Daerah pedalaman menjadi penopang daerah penghasil rempah. Hal ini terjadi karena di daerah penghasil rempah prioritas masyarakat lebih cenderung untuk tidak menanam tanaman pangan. Oleh karenanya, tanaman pangan didatangkan dari daerah lain, termasuk daerah pedalaman. Dengan demikian, daerah pedalaman berperan menjaga siklus produksi masyarakat di daerah penghasil rempah yang menjadi faktor penarik perdagangan dan pelayaran samudera.

Selain upaya saling memenuhi kebutuhan antara daerah pedalaman dan pesisir, ada pula bukti yang menguatkan bahwa aspek kemaritiman telah dikenal di daerah pedalaman. Hal ini tampak dari adanya relief yang menceritakan aktivitas

kemaritiman di Borobudur. Selain itu, dalam prasasti bertanggal 17 Mei 827 yang ditemukan di kaki Gunung Sumbing (Temanggung, Jawa Tengah) disebutkan adanya jabatan nahkoda kapal (*Daṅ Pu-hāwayṅ Glis*) dari Sumatera yang memberikan persembahan kepada *si*ma-nya (Utomo, 2014:15).

Lekatnya laut dalam masyarakat pedalaman dapat pula dilihat dari adanya mitologi tentang Nyai Lara Kidul. Eksistensi laut memiliki keterkaitan dengan pendirian kerajaan Mataram yang ada di pedalaman. Upaya itu dilakukan oleh Sutawijaya atau Panembahan Senapati yang memiliki hubungan gaib dengan penguasa pantai selatan Jawa. Sartono Kartodirdjo menafsirkan bahwa hubungan ini ditafsirkan sebagai “dwi tunggal antara daratan dan laut” (Kartodirdjo, 2014:149). Hal ini menjadi faktor yang memperkuat konsepsi tentang tanah air.

Di tiap periode ada beberapa materi yang memiliki kesamaan tema. Materi-materi tersebut bertema: (1) perniagaan, (2) pelayaran dan eksplorasi, (3) persilangan budaya dan inkorporasi gagasan,

(4) peperangan dan perlawanan, dan (5) penguasaan wilayah dan politik kelautan. Ke lima materi ini dapat dikembangkan secara fleksibel pada tiap periodisasi dan diintegrasikan pada tiap kompetensi dasar.

Pengembangan materi perlu didukung dengan sumber-sumber yang memadai. Pada pengembangan sumber, ada beberapa buku yang layak direkomendasikan. Buku yang direkomendasikan meliputi: (1) konsep-konsep sejarah maritim dan (2) aspek-aspek kemaritiman dalam perspektif sejarah. Kajian atas konsepsi sejarah maritim dilakukan untuk mengetahui aspek teoretis tentang arti penting laut dan perairan bagi kehidupan masyarakat. Beberapa referensi yang dapat digunakan adalah buku *Sejarah Maritim Indonesia* karya Abd Rahman Hamid (2015). Selain itu, bahkan ada referensi yang dapat diakses secara *online* seperti *Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa* yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro dan Departemen Kelautan dan Perikanan (Supangat, [ed], 2003).

Referensi tentang aspek kemaritiman dalam perspektif sejarah sebenarnya dapat diperoleh dari beberapa sumber yang sudah ada. Beberapa sumber tersebut adalah *Sejarah Nasional Indonesia* edisi pemutakhiran yang terbit pada 2008, terutama pada jilid II (Zaman Kuno), jilid III (Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia), dan jilid IV (Kemunculan Penjajahan di Indonesia). Selain itu dapat pula digunakan *Indonesia dalam Arus Sejarah* terbitan tahun 2012 pada jilid II (Kerajaan Hindu Buddha), jilid III (Kedatangan dan Peradaban Islam), dan jilid IV (Kolonisasi dan Perlawanan). Akan tetapi, di kalangan guru sumber pokok ini masih terbatas, sehingga perlu adanya upaya untuk mengadakan sumber-sumber ini di perpustakaan-perpustakaan sekolah.

Bridging: Pengembangan Aspek Context

Pengembangan kedua ditinjau dari aspek konteks. Aspek ini menyangkut sistem pelaksanaan pembelajaran sejarah mari-

tim. Pada aspek ini, minimal terdapat tiga pilar penopang, yaitu (1) guru, (2) strategi pembelajaran, dan (3) fasilitas penunjang. Dalam pembelajaran sejarah maritim, guru memiliki posisi penting. Guru sejarah berperan sebagai penransmisi pengetahuan kesejarahan dan pendorong siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri (Grant, 2003). Dalam konteks pembelajaran sejarah maritim, pengenalan aspek-aspek kemaritiman perlu diberikan pada guru-guru sejarah. Ini karena dalam pembelajaran sejarah maritim banyak diulas aspek-aspek kemaritiman kemaritiman. Oleh karena itu, pengembangan pengetahuan guru tentang isu-isu aspek-aspek kemaritiman menjadi prasyarat pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim.

Pengembangan pengetahuan guru sejarah tentang sejarah maritim dilakukan dengan tiga pendekatan. *Pertama*, menyediakan fasilitas dan akses bagi guru untuk mempelajari konsep kemaritiman dan sejarah maritim. *Kedua*, memacu guru untuk secara aktif mencari referensi di berbagai sumber. *Ketiga*, pendampingan terhadap guru dalam pengembangan pengetahuan tentang sejarah maritim. Ke tiga pendekatan tersebut tidak hanya menjadi tugas guru, tetapi juga melibatkan peran serta *stakeholders* sebagai pendamping guru sejarah.

Di dalam proses pendampingan, beberapa pihak memiliki peran untuk menambah pengetahuan dan pemahaman guru (Ahmad, 2013). *Pertama*, pemerintah berperan dalam hal kebijakan dan penyediaan fasilitas penunjang. *Kedua*, sejarawan berperan dalam pengembangan historiografi sejarah maritim Indonesia. Saat ini sudah banyak muncul sejarawan yang mengembangkan penelitian dalam bidang sejarah maritim. Namun demikian, kajian tentang hubungan pedalaman dan pesisir masih belum banyak diulas. Oleh karena itu, perlu satu gerakan yang mendorong sejarawan mengembangkan kajian sejarah maritim yang dihubungkan dengan wilayah pedalaman.

Ketiga, LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) berperan dalam

menyiapkan calon guru sejarah yang mampu mengembangkan pembelajaran sejarah maritim. Caranya adalah dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi guru dan calon guru sejarah. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan oleh LPTK adalah pengembangan mata kuliah Sejarah Maritim. *Keempat*, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). MGMP berperan sebagai komunitas yang saling menguatkan dan mendukung pengembangan sejarah maritim. *Kelima*, media massa. Media massa berperan sebagai sarana publikasi hasil kajian tentang sejarah maritim dan isu-isu terkait dengan kemaritiman.

Pilar kedua dalam aspek pengembangan konteks adalah strategi pembelajaran. Hasan (2016) mengungkapkan ada beberapa pendekatan yang direkomendasikan dalam pembelajaran sejarah maritim. Untuk wilayah pesisir, guru dapat mengaitkan antara peninggalan kemaritiman di sekitar lingkungan sekolah menjadi sumber belajar. Untuk wilayah pedalaman ada beberapa langkah yang direkomendasikan (1) memperkenalkan laut dan kemaritiman sebagai lingkungan kehidupan bangsa; (2) memperkenalkan jalur perdagangan dan barang dagangan; (3) mengidentifikasi barang-barang dagangan yang berasal dari daerahnya dan berasal dari wilayah lain yang dibawa menyeberang laut (Hasan, 2016:8).

Dalam pengembangan pilar strategi ditawarkan tiga pendekatan dalam pembelajaran (Ahmad, 2013). Pendekatan tersebut adalah (1) pendekatan kronologis-integratif, (2) pendekatan kapita selekta, (3) pendekatan tematis-kronologis.

Pendekatan yang paling sederhana dalam pengembangan pembelajaran sejarah maritim adalah kronologis-integratif. Pada pendekatan ini, materi-materi terkait sejarah maritim Indonesia menjadi bagian dari materi yang telah ada. Tiap mendiskusikan materi tertentu. Selain itu, didiskusikan juga aspek-aspek kemaritiman yang terjadi pada periode tersebut. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah perlunya pencarian terhadap aspek-aspek kemaritiman yang terjadi dalam

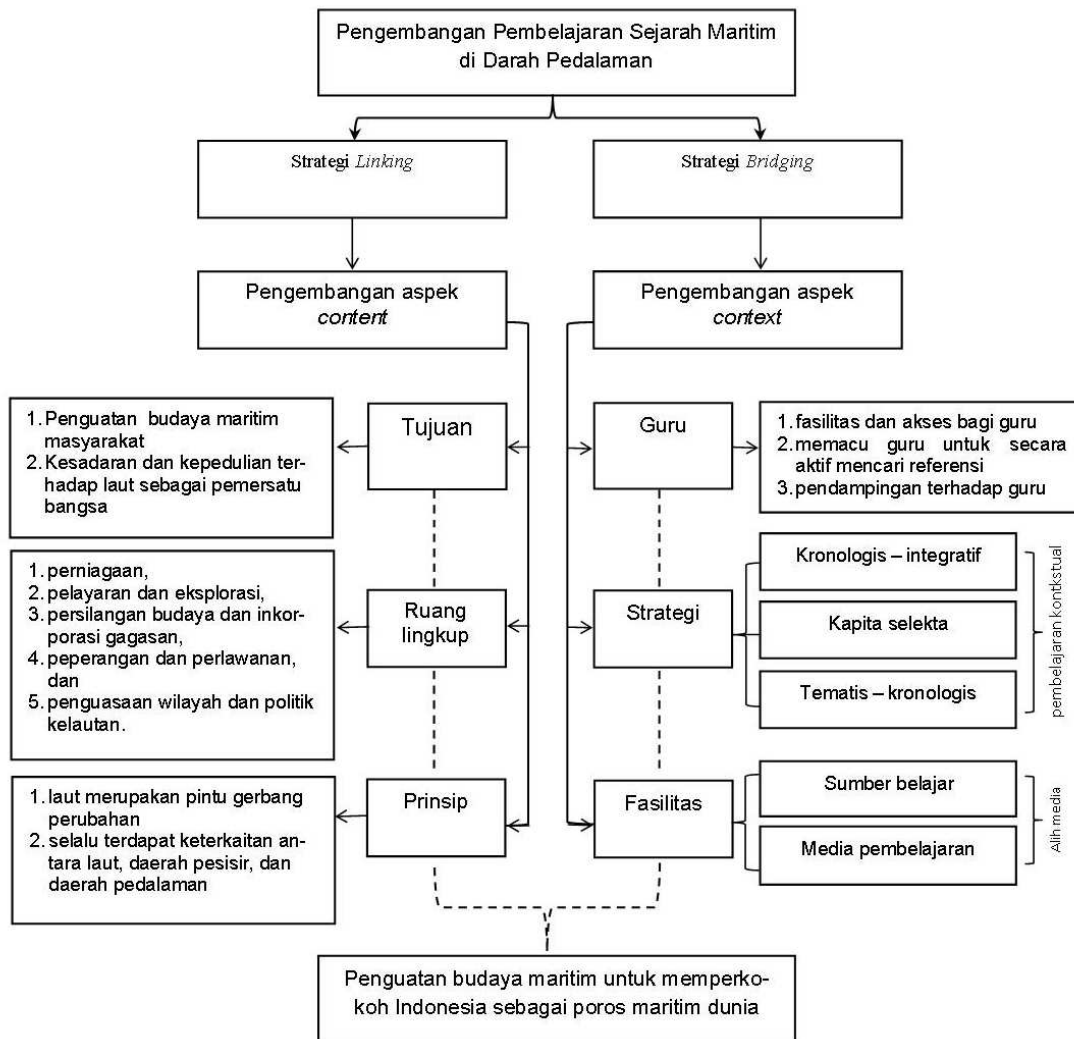
setiap periode.

Pendekatan kedua dalam pengembangan pembelajaran sejarah maritim adalah kapita selekta. Berbeda dengan pendekatan pertama yang mengintegrasikan aspek kemaritiman dalam materi yang telah tersedia, pendekatan ini lebih bersifat mandiri. Dalam hal ini perlu dikembangkan satu materi khusus yang menjelaskan perkembangan sejarah maritim dalam berbagai tema untuk setiap periode. Dengan demikian, ada alokasi khusus yang dirancang untuk menjelaskan perkembangan berbagai isu lingkungan. Misalnya adalah ada materi pokok khusus yang menjelaskan tentang sejarah maritim di Indonesia. Materi tersebut berisikan beberapa tema penting yang diambil dari beberapa periode sejarah, mulai prasejarah sampai kontemporer.

Pendekatan ketiga dalam pengembangan pembelajaran sejarah maritim adalah tematis-kronologis (Ahmad, 2013). Secara ideal, pendekatan ini mengulas beberapa tema penting secara terperinci. Tema-tema sejarah maritim dibicarakan dalam beberapa pertemuan khusus. Namun demikian, pengembangan kompetensi dasar baru memerlukan kebijakan baru dalam kurikulum. Pendekatan ini lebih kompleks daripada pendekatan pertama dan kedua. Ini karena pendekatan tematis-kronologis menuntut adanya satu kompetensi dasar khusus yang dialokasikan untuk mendiskusikan tema-tema dalam sejarah maritim.

Ke tiga pendekatan pembelajaran sejarah maritim dapat diimplementasikan melalui berbagai pendekatan dan strategi. Guru dapat memilih berbagai pendekatan, model, dan metode yang disesuaikan dengan karakteristik materi.

Untuk mewujudkan kebermanaknaan dalam pembelajaran sejarah maritim, perlu pengaitan materi dengan konteks yang terjadi di sekitar siswa. Konteks mencakup fenomena di masyarakat, peristiwa aktual, permasalahan sosial, isu hangat yang tengah berkembang, jiwa zaman, dan perkembangan keilmuan mutakhir (Ahmad, 2013). Pada daerah berbasis maritim, konteks yang dapat dikem-



Gambar 2. Pengembangan Pembelajaran Sejarah Maritim di Daerah Pedalaman

bangkan misalnya berbagai tradisi yang berhubungan dengan laut, seperti sedekah laut. Selain itu, konteks dapat dilihat dari aktivitas nelayan dan pelabuhan yang ada. Akan tetapi permasalahan muncul ketika pembelajaran diterapkan di daerah pedalaman. Konteks yang hendak dikaitkan sangatlah terbatas. Namun demikian, ada alternatif yang dapat dipilih berupa kondisi kekinian yang berhubungan dengan perdagangan, seperti komoditas perniagaan yang berasal dari daerah pesisir yang diperdagangkan di pasar. Apabila memungkinkan, dapat pula dikaitkan antara sungai dan laut sebagai bagian yang terintegrasi. Di sini guru perlu bekerja keras dalam mengaitkan realitas perdagangan saat ini dengan aspek kemaritiman dilihat

dari perspektif sejarah.

Pilar ketiga dalam aspek konteks adalah ketersediaan fasilitas belajar. Fasilitas belajar meliputi ketersediaan sumber dan media yang menunjang pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah maritim, sumber belajar yang paling mudah diakses adalah aktivitas terkait aspek kemaritiman yang tengah terjadi saat ini. Guru dapat memanfaatkan internet untuk mendapatkan sumber-sumber mutakhir terkait aspek kemaritiman. Penggunaan media sangat penting untuk mewujudkan atmosfer pembelajaran yang sesuai. Dalam hal ini perlu ada upaya untuk “membawa kehidupan maritim ke dalam kelas” dengan memanfaatkan berbagai media. Media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran

sejarah maritim antara lain gambar-gambar tentang aktivitas dan peninggalan kemaritiman, poster, video dokumenter, dan berbagai media yang dapat diakses dari internet.

SIMPULAN

Pembelajaran sejarah maritim memiliki arti strategis dalam menopang visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui pembelajaran sejarah maritim, penguatan aspek budaya maritim menjadi dimungkinkan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis berbagai praktik yang dilakukan oleh masyarakat di masa lalu berhubungan dengan kemaritiman. Namun demikian, pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim terkendala ketika disampaikan pada daerah yang tidak berbasis maritim. Untuk itu, perlu ada pendekatan khusus yang dilakukan dalam pembelajaran sejarah maritim. Pendekatan ini difokuskan untuk membangun pemahaman tentang arti penting laut dan perairan dalam sejarah umat manusia. Upaya untuk mewujudkan keterkaitan antara daerah pesisir dan pedalaman dilakukan dengan berdasarkan pada premis utama bahwa "laut merupakan pintu gerbang perubahan" dan "selalu terdapat keterkaitan antara laut, daerah pesisir, dan daerah pedalaman". Dengan pengembangan fokus tersebut diharapkan tidak ada lagi kesenjangan antara kawasan pedalaman dan pesisir dalam melihat potensi laut sebagai pemersatu bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Naskah ini dikembangkan kembali dari makalah berjudul "Menguatkan Visi Kemaritiman melalui Pembelajaran di Wilayah Pedalaman" yang dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Sejarah (KNS) X di Jakarta pada 7-10 November 2016. Penulis berterima kasih kepada Prof. Dr. Said Hamid Hasan, M.A., Dr. Saleh As'ad Djamhari, Dr. Umasih, M.Hum., serta seluruh panelis dan peserta KNS yang telah memberikan masukan untuk perbaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Tsabit Azinar. 2013. "Pembelajaran Sejarah berwawasan Lingkungan." *Indonesian Journal of Conservation*, 2(1): 74-83.
- Asnan, Gusti. 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Braudel, Fernand. 1972. *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*. Volume I. Diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Sian Reynolds. New York: Harper & Row.
- Grant, S.G.. 2003. *History Lessons: Teaching, Learning, and Testing in U.S. High School Classrooms*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Hamid. Abd Rahman 2015. *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Haryanto, Nur Achmad. 2010. "Kesadaran Masyarakat dan Siswa Sekolah Dasar terhadap Sejarah Maritim di Kabupaten Rembang." *Skripsi*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Hasan, Said Hamid. 2016. "Pendidikan Sejarah Maritim." *Makalah*. Disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah (KNS) X di Jakarta 7-10 November 2016.
- Kartodirdjo, Sartono. 2014. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 10-12, 145.
- Lapian, A.B. 1992. "Sejarah Nusantara Sejarah Bahari". *Pidato Pengukuhan*. Diucapkan pada upacara penerimaan jabatan guru besar luar biasa Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tanggal 4 Maret 1992.
- Lapian, A.B. 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara abad ke-16 dan 17*. Depok: Komunitas Bambu.
- Paine, Lincoln. 2013. *The Sea and Civilization: A Maritime History of the World*. New York: Alfred. A. Knopf.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*
- Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. 2014. Diakses 1 Oktober 2016 dalam <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi>

- Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx.
- Raharjo, Supratikno. 2002. *Peradaban Jawa Dinamika Pranata Politik, Agama, dan Ekonomi Jawa Kuno*. Depok: Komunitas Bambu. Hlm. 259.
- Statistik Indonesia 2016*. Jakarta: Diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
- Sulistiyono, Singgih Tri. 2009. "Historiografi Maritim Indonesia: Prospek dan Tantangan." *Makalah* dipresentasikan pada Seminar Nasional Musyawarah Wilayah II DIY – Jateng yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 8 Mei 2009.
- Sulistiyono, Singgih Tri. dkk. 2005. "Model Sosialisasi dan Enkulturasikan Nilai-Nilai Kebaharian untuk Memperkuat Integrasi Indonesia sebagai Negara Maritim melalui Pengajaran Sejarah dan Budaya Maritim Nusantara di Sekolah Dasar." *Laporan Penelitian*. Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.
- Supangat, Agus (Ed). 2003. *Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa*. Jakarta: Diterbitkan Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang dan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Thohir, Mudjahirin. 1999. *Wacana Masyarakat dan Kebudayaan Jawa Pesisiran*. Semarang: Penerbit Bendera.
- Utomo, Bambang Budi. 2014. "Awal Perjalanan Sejarah menuju Negara Kepulauan." Dalam Dorothea Rosa Herliany, dkk (ed). *Arus Balik Memori Rempah dan Bahari Nusantara Kolonial dan Poskolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 1-43
- Wasino. 2005. *Tanah, Desa, dan Penguasa: Sejarah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa*. Semarang: Unnes Press.
- Zuhdi, Susanto. 2006. "Laut, Sungai dan Perkembangan Peradaban: Dunia Maritim Asia Tenggara, Indonesia dan Metodologi Strukturis." *Makalah*. Disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta 14-16 November 2006.

Informan

- Arifin Suryo Nugroho, M.Pd. Ketua Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto, korespondensi elektronik pada 9 September 2016.
- Azizah Ariani, S.Pd.Gr., Guru IPS di SMK Mandiraja, Banjarnegara, korespondensi elektronik pada 9 September 2016.
- Heni Purwono, M.Pd., Guru Sejarah SMA N 1 Sigaluh Banjarnegara sekaligus Ketua MGMP Sejarah Kabupaten Banjarnegara, korespondensi elektronik pada 9 September 2016.
- Sri Utari, S.Pd, Guru Sejarah di SMA N 1 Banjarnegara, korespondensi elektronik pada 9 September 2016.